

Communication Strategy of the Independent Election Commission in Educating First-Time Voters

Strategi Komunikasi Komisi Independen Pemilihan dalam Mengedukasi Pemilih Pemula

OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online) ISSN 2302-6790 (print)

> Edited by: Didik Hariyanto

*Correspondence: uswatunnisa@usk.ac.id

Citation:

Uswatun Nisa, Muhammad Hasan, Saleh Sjafer, dan Zuhra Meiliza (2025). Strategi Komunikasi Komisi Independen Pemilihan dalam Mengedukasi Pemilih Pemula 13 (2)

Doi: 10.21070/kanal.v13i2.1843

Uswatun Nisa¹*, Muhammad Hasan², Saleh Sjafei³, Zuhra Meiliza⁴

Abstract

This study aims to examine the strategies employed by KIP Kota Banda Aceh in educating new voters. The theories used in this study include Karl Weick's Organizational Information Theory and Argyris' Organizational Learning Theory. This research adopts a qualitative approach, utilizing interviews as the primary data collection technique. The findings reveal that KIP's information reception process involves gathering data on new voters and mapping their numbers. The selection process entails filtering relevant information to be used as a reference for the 2019 election, while the retention process focuses on formulating strategies and determining the technical implementation of programs as a foundation for strategic planning. From the perspective of organizational learning theory, KIP's educational strategy primarily applies a single-loop learning approach, with no indication of double-loop learning. This suggests that the education strategy remains suboptimal in effectively reaching and enhancing new voters' understanding. One of the main challenges is the reliance on educational programs that largely replicate strategies from the 2019 election without significant innovation.

Keywords: Communication Strategy, KIP, New Voters, Organizational Information, Organizational Learning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam mengedukasi pemilih pemula. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Informasi Organisasi oleh Karl Weick dan teori pembelajaran organisasi oleh Argyris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerimaan informasi dilakukan KIP dengan mencari informasi seputar pemilih pemula dan memetakan jumlah pemilih pemula, proses seleksi dengan cara menyeleksi informasi yang dapat digunakan dan menjadi pemilu 2019 sebagai acuan, serta proses retensi dengan cara merumuskan strategi dan menentukan teknis pelaksaan program menjadi dasar dalam membuat strategi. Berdasarkan perspektif teori pembelajaran organisasi, strategi edukasi yang dilakukan KIP hanya menerapkan pendekatan single-loop learning dan tidak ada unsur double-loop learning. Artinya, strategi edukasi yang dilakukan oleh KIP masih belum optimal dalam menjangkau dan meningkatkan pemahaman pemilih pemula. Salah satu kendala utama adalah sebagian besar program edukasi masih

^{1,2,}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banca Aceh, Indonesia

⁴Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi, Indonesia

menggunakan strategi yang diterapkan pada Pemilu 2019 tanpa adanya inovasi yang signifikan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, KIP, Pemilih Pemula, Informasi Organisasi, Pembelajaran Organisasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokratis yang diselenggarakan oleh suatu negara sebagai wujud nyata demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menegaskan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama proses pengumpulan kehendak rakyat (Adawiyah, 2019).

Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam menyukseskan setiap keberlangsungan pemilu, termasuk kelompok pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk pertama kali. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang pemilu, mengenal peserta pemilu secara transparan, serta terbebas dari intimidasi dan mobilisasi politik (Kaelola, 2009; Zulfan, Amin, & Saleh, 2022; Syahruni, 2014). Selain itu, partisipasi masyarakat pemilih menjadi perhatian bagi berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu yang menginginkan dukungan, serta organisasi pemantau yang memastikan transparansi dan keadilan dalam pemilu. (Kaelola, 2009; Zulfan et al., 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, di Aceh, penyelenggaraan pemilu memiliki kekhususan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Di wilayah ini, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang terdiri dari KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, termasuk KIP Kota Banda Aceh yang didirikan pada tahun 2003 (KPU, 2016).

Kelompok pemilih pemula menjadi salah satu kelompok sasaran penyelenggara pemilu untuk diberi edukasi. Pemilih pemula sendiri adalah mereka yang telah mencapai usia pemilih dan untuk pertama kalinya menggunakan hak suaranya dalam pemilu (KPU RI, 2010; Lestari, 2019). Kelompok ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dari generasi sebelumnya, terutama karena mereka sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sayangnya, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa generasi muda cenderung bersikap skeptis dan apatis terhadap politik. Mereka juga menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan politik, ketidakpastian solusi atas permasalahan nasional, hingga dampak globalisasi (Fathurokhman, 2022; Heriyanto, 2023; Wardhani, 2018). Berbagai hal ini menjadi alasan pentingnya pemahaman dan kesadaran politik para pemilih pemula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pemberian edukasi politik bagi pemilih pemula (Affandi, 2019; Bin Hasyim et al., 2019; Sa'ban et al., 2022; Suryanef & Rafni, 2020). Edukasi politik menjadi pendekatan yang

efektif yang bertujuan untuk membimbing pemilih pemula dalam memahami proses pemilu dan pentingnya berpartisipasi secara aktif (Wulandari & Kurniawan, 2024). Melalui edukasi yang baik, pemilih pemula akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi, serta memiliki kesadaran bahwa suara mereka dapat berkontribusi dalam menentukan kebijakan publik dan perubahan sosial (Bin Hasyim et al., 2019). Partisipasi pemilih pemula dapat menciptakan perubahan positif dalam sistem politik, seperti menentukan kebijakan publik, mempengaruhi perubahan sosial, dan menciptakan pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Affandi, 2019).

KIP Kota Banda Aceh selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain sosialisasi melalui LSMPI (Obrolan Opini Terbaru), kunjungan KIP ke kampus, sosialisasi melalui seminar, dan rekrutmen relawan demokrasi. KIP melaksanakan sosialisasi bekerjasama dengan berbagai komunitas atau organisasi seperti LSM dan BEM yang menjadi mitra kerja KIP (Hardiyanti, 2021).

Namun, Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola komunikasi, strategi yang diterapkan pada Pemilu 2019 perlu terus berkembang agar tetap relevan. Dalam dunia yang terus berubah dengan inovasi yang cepat, penting bagi lembaga seperti KIP untuk memantau tren baru guna memastikan efektivitas komunikasi dengan masyarakat, terutama pemilih pemula (Effendy, 2011; Efriza, 2012). Hal ini tentu saja membuat KIP harus terus mengembangkan strategi komunikasi yang telah diterapkan pada tahun 2019 untuk pemilu 2024.

Berdasarkan data KIP Kota Banda Aceh tahun 2023, jumlah pemilih tetap tercatat sebanyak 169.146 orang, di mana 22.273 di antaranya merupakan pemilih pemula (KIP, 2023). Jumlah pemilih pemula yang sangat besar di Kota Banda Aceh menandakan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap mereka dalam hal edukasi pemilihan umum. Peneliti melakukan observasi awal terhadap pemilih pemula di Banda Aceh dan menanyakan pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu, sistem pemilu, lembaga pemilu, dan partisipasi pemilu. Hasilnya mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai pemilu. Beberapa diantaranya mengaku tidak yakin tentang tahapan pemilu, peran lembaga terkait, serta prosedur pemungutan suara yang benar. Beberapa pemilih pemula juga mengakui bahwa mereka belum menyadari tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Hal inilah yang membuat perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dan komprehensif untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang cukup dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai kelompok yang baru terjun dalam proses demokrasi, pemilih pemula membutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan pemilu dan bagaimana mereka pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu (Bin Hasyim

et al., 2019; Fathurokhman, 2022; Wulandari & Kurniawan, 2024).

Pentingnya edukasi politik juga dikarenakan banyaknya berita palsu yang muncul terkait dengan pemilu, yang akhirnya memberi pemahaman yang salah kepada calon pemilih. Fenomena berita palsu ini juga terjadi di Amerika dan China. Penelitian yang dilakukan oleh Stachofsky (2023) dan (Chen 2024) menegaskan, berita palsu atau hoaks sangat mempengaruhi kepercayaan pemilih terhadap pemilu.



Gambar 1. Data Pemilih Kota Banda Aceh Sumber : www.kipbandaaceh.go.id

Beberapa penelitian telah membahas strategi komunikasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula (Affandi, 2019; Bin Hasyim et al., 2019; Fathurokhman, 2022; Fitria, 2023; Lestari, 2019; Wardhani, 2018; Zulfan et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) menemukan bahwa penggunaan media sosial dan kampanye tatap muka berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. (Santoso, 2020) menyimpulkan bahwa komunikasi berbasis digital lebih efektif dibandingkan metode konvensional, sementara (Nugroho, 2021) menyoroti pentingnya interaksi langsung dengan komunitas dalam menyampaikan informasi kepemiluan. Lestari (2019) juga menemukan bahwa strategi relawanrisasi dengan cara sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemilih pemula menjadi metode yang efektif.

Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tingkat partisipasi dalam pemilu, bukan pada proses edukasi politik yang mendahuluinya. Padahal, pemilih pemula tidak dapat serta-merta diarahkan untuk memilih tanpa memahami esensi pemilu itu sendiri. Penelitian

Suryanef & Rafni (2020) membuktikan pentingnya edukasi politik bagi pemilih pemula untuk meningkatkan kesadaran demokrasi, mencegah mis informasi, mendorong partisipasi aktif, dan emperkuat akuntabilitas pemerinta. Penelitian terkait edukasi politik juga pernah dilakukan (Stachofsky (2023) dan Chen (2024) di Amerika dan China, yang dikaitkan dengan banyaknya berita hoaks tentang pemilu. Hasil penelitian mereka menegaskan pentingnya edukasi politik bagi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari mis informasi tentang pemilu. Penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemilih diedukasi. Gap dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang membahas strategi edukasi politik yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KIP di Kota Banda Aceh. Sebagian besar penelitian hanya mengukur hasil akhir berupa tingkat partisipasi, sementara aspek edukasi yang menjadi fondasi utama sering kali diabaikan.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana KIP Kota Banda Aceh mengelola informasi dalam memberikan edukasi bagi pemilih pemula, bukan hanya sekadar mengevaluasi tingkat partisipasi mereka dalam pemilu. Teori informasi organisasi Karl Weick dan Teori pembelajaran organisasi yang dikemukakan oleh Argyris menjadi kerangka yang relevan untuk penelitian ini. Teori informasi organisasi akan menekankan bagaimana proses KIP Kota Banda Aceh dalam menerima, memilih, dan menyimpan informasi guna mengembangkan strategi edukasi politik yang lebih efektif (Littlejohn, 2010; West, 2009). Sementara teori pembelajaran informasi akan membantu peneliti menjelaskan bagaimana organisasi dapat belajar, beradaptasi, dan berkembang dengan mengolah informasi serta pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan inovasi (Argyris, 1996; Kolb, 1984). Melalui teori ini juga akan terlihat bagaimana pembelajaran KIP Kota Banda Aceh dalam menyusun strategi edukasi politik bagi pemilih pemula. Elemen Single-Loop Learning dan Double-Loop Learning akan menjadi elemen pengukur pembelajaran organisasi KIP Kota Banda Aceh.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat segmen pemilih pemula memiliki jumlah yang besar di Kota Banda Aceh, dan sangat perlu untuk diedukasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan inovatif dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada pemilih pemula. Dengan strategi yang tepat, KIP dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda serta memastikan mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan,

mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur sesuai dengan penelitian ini karena dapat memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan fokus dalam proses pengumpulan data (Moleong, 2009).

Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama terdiri dari dua orang yaitu Muhammad Zar, S.E selaku komisioner KIP Kota Banda Aceh divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, dan Saifrul Haris, S.T., M.M selaku komisioner KIP Kota Banda Aceh divisi perencanaan, data dan informasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan beberapa ketentuan. Kriteria informan yaitu berada ada aktif di Kantor KIP, memiliki pengetahuan dalam tata cara pembuatan strategi komunikasi terkait pemilu dan mengetahui tentang pentingnya pembuatan suatu strategi yang dibuat untuk pemilih pemula.

Informan pendukung terdiri dari empat orang yaitu Dr. Effendi Hasan, M.A selaku pakar serta pengamat politik, Fahmi Aldi, Rana Raihanah, dan Raisa Nabila selaku pelajar yang juga pemilih pemula. Pemilih pemula yang dijadikan informan adalah mereka dengan usia 17-21 tahun, berdomisili di Banda Aceh, serta pernah mengikuti program edukasi KIP.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016), melalui beberapa proses, antara lain: reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conslusion). Proses reduksi data dilakukan dengan memfilter keseluruhan hasil wawancara menjadi data-data penting yang diperlukan dalam penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data hasil reduksi ke dalam laporan yang mudah dipahami. Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian. Dalam proses analisis data, peneliti dapat memberikan tambahan makna, tafsiran, argumen, serta membandingkan hubungan antara satu dengan lainnya sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Enactment KIP Kota Banda Aceh

Analisis berfokus pada rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana strategi komunikasi KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan edukasi pada pemilih pemula. Analisis dilakukan menggunakan teori penerimaan informasi yang dikemukakan oleh (*enactment*), seleksi (*selection*), dan retensi (*retension*) (West, 2009).

Aspek pertama adalah penerimaan Informasi atau *enactment*. Penerimaan informasi mengacu pada proses dimana informasi diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. Anggota organisasi memperhatikan informasi yang mereka terima untuk mengidentifikasi permasalahan. Proses penerimaan informasi melibatkan bagaimana anggota menerima, memproses, dan merespons berbagai jenis informasi (Morissan, 2013). KIP Kota Banda Aceh mengelola informasi yang diterima dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, media, serta badan *ad hoc* seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). PPK dan PPS dapat mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat tentang pemilu dengan terjun ke masyarakat.

Informasi tersebut kemudian diterima dan diolah untuk menentukan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Berdasarkan wawancara dengan informan Muhammad Zar, KIP telah memberikan informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang terbukti dari tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam pemilu 2019. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat benar dan tidak terdistorsi oleh hoaks. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi berkelanjutan untuk memastikan masyarakat, terutama pemilih pemula, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memilah dan memahami informasi yang benar.

"Dapat dikatakan sebenarnya masyarakat itu setidaknya sudah paham tentang pemilu, namun KIP tetap harus memberikan edukasi kepada mereka. Tanggung jawab KIP sebagai penyelenggara pemilu adalah untuk terus mempertahankan bahkan menaikkan angka partisipasi dengan membuat masyarakat menjadi lebih paham" (Muhammad Zar, Oktober 2023).

Selama ini, KIP memperoleh informasi melalui struktur hierarkisnya, yakni PPK dan PPS, yang berperan dalam mengidentifikasi persepsi dan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh badan ini menjadi dasar bagi KIP dalam menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif.

"Informasi yang diperoleh melalui PPK dan PPS menjadi dasar dalam merancang sosialisasi yang lebih spesifik kepada pemilih pemula", (Muhammad Zar, Oktober 2023)

Informasi yang diterima dari berbagai pihak memperlihatkan bahwa pemilih pemula, khususnya yang berusia 17 tahun dan baru pertama kali memilih, cenderung kurang antusias dibandingkan dengan pemilih yang lebih berpengalaman. Salah satu faktor utama dari fenomena ini adalah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu, dan kurang banyaknya informasi positif yang menerpa mereka di media sosial. Informasi melalui media sosial akan sangat penting jika sasaran dari program edukasi adalah pemilih pemula (Suryanef & Rafni, 2020).

"Kalau kita perhatikan, pemilih pemula khususnya yang siswa yang 17 tahun yang baru memilih itu memang tidak seantusias orang orang yang sudah memilih atau yang sudah berumur diatas mereka. Bisa kita bilang seperti apatis, tetapi mereka seperti itu ya karena pemahaman mereka yang kurang." (Saiful Haris, Oktober 2023).

Menurut Muhammad Zar, pemahaman pemilih pemula terkait pemilu secara teoritis sudah mulai terbentuk melalui informasi-informasi yang mereka akses melalui media sosial. Namun banyak diantara pemilih pemula yang mengabaikan informasi tersebut karena tidak menganggap pelaksanaan pemilu adalah sesuatu yang mempengaruhi mereka.

Jawaban ini seperti yang ditemukan dalam sejumlah penelitian yang melihat bagaimana persepsi generasi muda terhadap pemilu (Alfaruqy, 2019; Puspitasari, 2024). Disimpulkan bahwa sebagian besar generasi muda memiliki kepercayaan yang sangat rendah terhadap kandidat-kandidat pemilu, salah satunya disebabkan oleh kasus korupsi, perebutan kekuasaan, dan hanya mementingkan golongannya saja. Inilah yang membuat mereka tidak antusias menyambut pemilu. Hal yang sama kemudian didukung oleh informan Saiful Haris yang menuturkan bahwa pemahaman mereka perlu diperhatikan lebih jauh karena pemilih pemula ini sama sekali belum pernah mengikuti pemilu.

"Kita sempat melakukan sosialisasi disekolah kita menanyakan juga kepada siswa siswi bagaimana pemahaman mereka tentang pemilu. Ada beberapa dari mereka cukup paham, artinya secara teori mereka sudah membaca atau mengetahui apalagi sekarang adanya media media dan adanya HP yang bisa mengakses

informasi informasi itu dan mereka peduli. Namun ada juga siswa siswa yang tidak peduli sama sekali dan itu juga banyak. Itu menjadikan saya selaku ketua divisi ini harus membuat mereka tertarik dengan pemilu ini karena seperti yang saya katakan di awal kami memiliki target 80% jadi karena pemilih pemula ini besar jumlah masanya yaitu 22.000 (dua puluh dua ribu) lebih." (Muhammad Zar, Oktober 2023).

Fokus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi dimana hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Menurut teori ini, organisasi berada dalam lingkungan informasi, ini berarti bahwa organisasi akan bergantung pada suatu informasi tertentu Morissan (2013). Tahap *enactment* ini penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pada tahap ini, seseorang memberikan perhatiannya terhadap informasi yang diterimanya yang menyebabkan ia mengetahui atau sadar terhadap adanya ambiguitas. Berdasarkan seluruh informasi yang diterima, akhirnya orang itu akan fokus pada satu masalah yang perlu diselesaikan. Di tahap ini, KIP Kota Banda Aceh fokus pada suatu isu, yaitu kurangnya pengetahuan serta antusiasme pemilih pemula untuk berpartipasi dalam pemilu.

Proses Selection Informasi KIP

Tahapan selanjutnya adalah proses seleksi. Seleksi informasi adalah langkah-langkah yang diambil organisasi untuk menentukan informasi mana yang dianggap relevan dan signifikan untuk menciptakan strategi komunikasi yang efektif. Ketika menerima informasi, anggota organisasi juga akan menolak informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang dihadapi (Adawiyah, 2019; Nugroho. Berdasarkan wawancara dengan informan Muhammad Zar, pemilihan informasi yang dilakukan oleh KIP didasarkan pada kebutuhan pemilih pemula. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik pemilih antara pemilu 2019 dan pemilu 2024, terutama dalam aspek isu politik, nilai-nilai pemilih, serta perkembangan teknologi. Meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan, strategi komunikasi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi terkini.

"Hari ini program yang akan dibuat itu didasari oleh kebutuhan pemilih. Sekarang pemilih pemula itu berbeda dengan yang di 2019, pasti ada perbedaan dari pemilih itu sendiri. Apalagi sekarang teknologi udah berkembang pesat ya mudah bagi mereka mengakses informasi. Itu secara digital, kalo secara politik perubahan itu seperti isu isu politik yang berbeda dan juga nilai nilai dari pemilih pemula itu berbeda sekarang. Jadi tentu ada perbedaan walaupun tidak begitu berbeda dan cara mengatasinya juga tidak jauh berbeda."(Muhammad Zar, Oktober 2023).

Lebih lanjut, dalam proses seleksi informasi, KIP secara rutin mengadakan rapat untuk mengevaluasi dan membahas strategi komunikasi yang akan digunakan pada pemilu 2024. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau jalannya pemilu 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan informasi yang paling relevan dan efektif untuk disampaikan kepada pemilih pemula.

"Dalam KIP sendiri tentu kami mengadakan rapat rutin. Disitu kami membahas segala hal terkait pemilu 2024. Dalam rapat tersebut tentu kami melihat bagaimana pemilu 2019 itu berjalan dan apa yang dilakukan oleh KIP sebelumnya. Program yang pernah dijalankan itu akan kami diskusikan sebagai acuan kedepan." (Muhammad Zar, Oktober 2023)

Pendapat tersebut diperkuat oleh informan Saiful Haris yang menuturkan bahwa pengalaman pemilu sebelumnya memberikan wawasan berharga dalam menentukan informasi yang harus disampaikan kepada pemilih pemula. Keberhasilan pemilu 2019, yang ditandai dengan tingginya angka partisipasi, menjadi salah satu indikator dalam menyusun strategi komunikasi untuk pemilu 2024.

"Tentu hal-hal yang berkaitan dengan pemilu 2019 itu akan berguna bagi kedepannya. Karena pengalaman komisioner sebelumnya itu penting untuk membuat pemilu 2024 sukses." (Saiful Haris, 16 Oktober 2023)

Dalam perspektif teori informasi organisasi, proses seleksi merupakan bagian dari tahapan pengolahan informasi yang memungkinkan organisasi memilih metode terbaik untuk memperoleh informasi tambahan dan menyaring informasi yang tidak relevan (Morissan, 2013). West & Turner (2009) menjelaskan bahwa setelah tahapan *enactment*, organisasi akan melakukan analisis informasi dan menggunakan berbagai aturan serta siklus komunikasi untuk menginterpretasikan informasi yang ambigu. Dalam tahap ini, seleksi informasi ini dilakukan melalui evaluasi data historis, pemanfaatan teknologi digital, serta interaksi langsung dengan pemilih pemula

melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan adanya proses seleksi yang sistematis, KIP dapat memastikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemilih pemula dan dapat meningkatkan efektivitas edukasi pemilih menjelang pemilu 2024.

Tahap *Retenti*on KIP Untuk Menentukan Strategi Komunikasi

Terakhir adalah tahapan retensi (retention). Retensi adalah proses di mana informasi yang telah dipilih akan diintegrasikan dengan informasi yang sudah ada dalam organisasi (West, 2009). Integrasi ini bertujuan agar informasi tersebut dapat digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya di masa depan. Pada tahap ini, informasi organisasi menyimpan tentang mengorganisasikan dirinya dengan memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang telah terdeteksi pada dua tahapan sebelumnya. Dengan kata lain, informasi yang dikumpulkan tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan tetapi diaplikasikan juga untuk merencanakan dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam operasional organisasi. Dalam tahap ini KIP Kota Banda Aceh menyimpan informasi mengenai cara untuk berorganisasi dengan memberi respons terhadap berbagai situasi. Respon tersebut diberikan melalui serangkaian strategi untuk edukasi politik pemilih pemula.

Berdasarkan wawancara dengan informan Muhammad Zar, informan mengatakan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KIP untuk mengedukasi pemilih pemula berdasarkan tujuan dapat meningkatkan minat dan partisipasi mereka sesuai dengan target yang telat ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu Saweu Sikula, kegiatan yang dibuat oleh KIP dengan mengunjungi sekolah atau lembaga pendidikan. Seperti yang dikatakannya yaitu:

"Tentunya dengan adanya edukasi yang kita lakukan itu bisa menarik mereka untuk berpartisipasi sesuai dengan target KIP yaitu pemilih pemula tentunya mereka antusias. Dibandingkan dulu artinya siswa siswa lebih mengerti karena adanya kegiatan kegiatan yang diadakan oleh KIP sendiri ke sekolah sekolah atau Saweu sikula dan juga adanya media media yang dapat diakses terkait tentang teori terkait pemilu." (Muhammad Zar, 12 Oktober 2023).

Salah satu agenda dari Saweu Sikula tersebut sudah

dilaksanakan di beberapa sekolah seperti di MAN 1 Model Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan tersebut, KIP memberikan edukasi pemilih melalui pemilihan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). KIP memberikan informasi dan edukasi kepada siswa tentang cara yang dilakukan oleh KIP dalam mengelola pemilihan umum melalui simulasi sejenis, yaitu pemilihan OSIS. Seperti yang dikatakannya yaitu:

"Kita sendiri sampai hari ini sudah melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah dan kami sudah pernah melakukannya di MAN Model yang mana kita membuat edukasi pemilih melalui simulasi pemilihan OSIS di sekolah mereka. KIP memberikan edukasi bagaimana cara yang dilakukan oleh KIP terhadap pemilu. Jadi kita memberikan informasi tentang pemilu atau pendidikan pemilu melalui simulasi sejenis sehingga mereka paham dan tentunya mereka ingin sekali antusias dengan semangat kalangan pemuda tentunya kalangan pemilih pemula yang mulai dari 17 tahun." (Muhammad Zar, Oktober 2023).

Upaya kedua yang dilakukan oleh KIP yaitu kegiatan Nonton Bareng film "Kejarlah Janji". Kegiatan nonton bareng tersebut memiliki tujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilu, memberikan informasi tentang bagaimana pemilih yang baik dan cerdas. Film "Kejarlah Mimpi" secara khusus ditujukan kepada pemilih pemula, meskipun juga dapat diikuti oleh masyarakat umum. Seperti yang dikatakan informan Muhammad Zar yakni:

"Ada juga kegiatan Nonton Bareng film "Kejarlah Janji". Program itu dibuat oleh KPU Pusat jadi kita diarahkan oleh pusat untuk membuat kegiatan tersebut. Jadi film itu isinya tentang pemilu itu sendiri jadi film itu ya tujuannya untuk sosialisasi bagaimana pemilih yang baik yang cerdas. Dan memang film ini lebih tepat ditujukan kepada pemilih pemula ya walaupun masyarakat umum juga bisa." (Muhammad Zar, 12 Oktober 2023).

Muhammad Zar menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemilih pemula terkait proses pemilu dan meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Pemilihan film ini tidak hanya karena kisahnya yang inspiratif, tetapi juga karena mampu menyentuh isu-isu krusial dalam pemilu. Sebelum pemutaran film, KIP akan menyelenggarakan sesi pengantar untuk memberikan

konteks pemilu dan pentingnya pemilih. Setelah pemutaran film, kami merencanakan sesi diskusi terbuka, memungkinkan peserta untuk berbagi pandangan, pertanyaan, dan pemikiran mereka terhadap tema yang diangkat dalam film. Kami percaya bahwa melalui kombinasi nonton bareng dan diskusi, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi praktis, tapi juga dapat membangun pikiran kritis tentang peran aktif dalam demokrasi, memotivasi peserta untuk ikut serta dalam proses pemilu mendatang.

Nonton bareng film "Kejarlah Janji" memiliki tujuan utamanya yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemilih pemula mengenai proses pemilu dan sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. Pemilihan film tersebut tidak hanya didasarkan pada kisah yang inspiratif, melainkan juga karena film tersebut mampu menyentuh isu-isu krusial yang terkait dengan pemilu. Diadakan sesi pengantar untuk memberikan konteks pemilu dan menjelaskan pentingnya peran pemilih dalam proses tersebut. Setelah pemutaran film, rencananya ada sesi diskusi terbuka yang memungkinkan peserta untuk berbagi pandangan, pertanyaan, dan pemikiran mereka terhadap tema yang diangkat dalam film.

Upaya ketiga yang dilakukan oleh KIP yaitu Rumah Pintar Pemilu (RPP). Program tersebut merupakan program yang dilakukan dengan mengundang para siswasiswi untuk berkunjung ke KIP yang sebagai Rumah pintar Pemilu (RPP) dengan tujuan mempelajari dan memahami konsep dari pemilu itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh informan Muhammad Zar yakni:

"KIP juga mengajak para siswa siswi untuk berkunjung ke KIP karena KIP juga sebagai Rumah Pintar Pemilu (RPP). Jadi dengan mengajak mereka berkunjung ke KIP mereka bisa belajar dan memahami konsep dari pemilu itu sendiri. Kami juga senang kalo mereka berkunjung ke tempat kami karena bisa kita lihat kalo mereka itu merespon apa yang ingin kami lakukan dan mereka antusias dalam memahami KIP dan pemilu itu sendiri." (Muhammad Zar, 12 Oktober 2023).

Upaya selanjutnya yaitu sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Melalui akun-akun tersebut, KIP menyediakan berbagai informasi seputar pemilu, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KIP. Selain media sosial, KIP juga memiliki website resmi yaitu

www.kip.bandaacehkota.go.id yang berisi profil tentang KIP dan informasi seputar pemilu. Seperti yang dikatakan oleh informan Muhammad Zar yakni:

"Kami juga memberikan sosialisasi melalui ig, facebook, twitter, disitu banyak kami berikan informasi-informasi seputar pemilu dan kegiatan kegiatan yang akan kami lakukan jadi biar mereka tau dan berminat ikut serta. Terus ada juga website resmi KIP yang isinya profil tentang KIP dan seputar pemilu juga ada disitu. Jadi melalui internet itu memudahkan mereka mencari informasi pemilu". (Muhammad Zar, 12 Oktober 2023)

Dalam mengedukasi pemilih pemula, KIP juga bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) salah satunya GERAK (Gerakan Anti Korupsi). Kegiatan yang dibuat oleh GERAK yaitu talkshow di SMAN 9 Kota Banda Aceh dengan mengikutsertakan KIP sebagai pemateri. Direncanakan KIP juga akan bekerjasama dengan LSM lainnya di Banda Aceh dalam kegiatan serupa hingga menjelang pemilu. Seperti yang dikatakan oleh informan Muhammad Zar yakni:

"KIP juga ada kerjasama dengan LSM salah satunya itu GERAK (Gerakan Anti Korupsi). Jadi pernah ada kegiatan seperti talkshow di SMA 9 kalo tidak salah tapi itu bukan KIP yang buat, orang-orang dari GERAK itu yang buat dan mengajak kami untuk ikut. Disitu kami bekerjasama dengan GERAK dan memberikan sosialisasi dan untuk kedepannya kami juga kan bekerja sama dengan LSM lainnya di Banda Aceh." (Muhammad Zar, 12 Oktober 2023)

Strategi KIP Dalam Mengedukasi Pemilih Pemula

Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah merancang strategi komunikasi berbasis teori informasi organisasi guna meningkatkan edukasi dan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

Teori Informasi Organisasi menggunakan komunikasi sebagai dasar mengorganisasi manusia dan memberikan pemikiran rasional dalam berorganisasi (Littlejohn, 2010). Teori informasi organisasi menyoroti tiga

indikator utama dalam pengelolaan informasi, yaitu penerimaan informasi, seleksi, dan retensi (Morissan, 2013; West, 2009). Melalui pendekatan ini, KIP Kota Banda Aceh berusaha memastikan bahwa informasi tentang pemilu tersampaikan secara efektif kepada pemilih pemula.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh telah memenuhi elemen-elemen yang sesuai dengan teori informasi organisasi. Pada tahap penerimaan informasi, KIP mengumpulkan data terkait karakteristik pemilih pemula, termasuk pemahaman mereka mengenai pemilu. Penerimaan informasi dilakukan melalui berbagai cara, melalui tim PPK dan PPS yang terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi karakteristik pemilih pemula. Pada tahap seleksi, KIP menganalisis data dari pemilu sebelumnya, khususnya Pemilu 2019, untuk menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih efektif. Setelah proses seleksi, KIP Kota Banda Aceh melakukan proses retensi, yaitu menentukan metode dan strategi yang tepat untuk mengedukasi pemilih pemula.

Sesuai dengan teori pembelajaran organisasi (Argyris, 1996), evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pemilu sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi yang lebih baik. Meskipun Pemilu 2019 dapat dijadikan acuan, setiap pemilu memiliki tantangan yang berbeda, sehingga diperlukan adaptasi dalam memilih strategi yang paling relevan untuk pemilih pemula pada Pemilu 2024. Akhirnya KIP Kota Banda Aceh merancang strategi komunikasi yang terbagi dalam dua pendekatan utama, yaitu secara offline dan online. Strategi ini diterapkan dalam berbagai kegiatan yang aktif serta edukatif. Penelitian yang dilakukan oleh Chen (2024) terkait dengan edukasi politik bagi partisipan di China juga membuktikan bahwa penggunaan kedua strategi ini sangat efektif untuk ditujukan pada pemilih pemula (Chen & Madni, 2024).

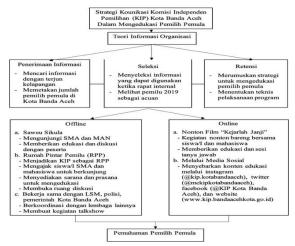
Salah satu program offline yang cukup diunggulkan oleh KIP Kota Banda Aceh adalah Saweu Sikula. Ini merupakan program sosialisasi yang dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman langsung tentang prinsip demokrasi dan proses pemilu. Kegiatan ini juga mencerminkan strategi pendidikan demokrasi berbasis simulasi, atau yang disebut *experiential learning* (Kolb, 1984). Dalam program ini siswa diberikan pengalaman langsung untuk

memahami pentingnya pemilu dan hak suara mereka. Kegiatan lainnya adalah nonton bareng, yang termasuk ke dalam metode sosialisasi berbasis audiovisual yang lebih menarik bagi pemilih pemula. Media visual dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan politik karena memiliki dampak emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan media teks. Film ini tidak hanya menghibur tetapi juga mengedukasi pemilih pemula tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pemilu. (Lai, 2024; Stachofsky et al., 2023; Suryanef & Rafni, 2020).

Kemudian, KIP juga menyediakan fasilitas RPP atau Rumah Pintar Pemilu yang berfungsi sebagai pusat edukasi pemilih yang menyediakan berbagai informasi mengenai sistem pemilu, hak suara, serta mekanisme pemilihan. Menurut konsep literasi politik (Dahlgren, 2009), pemilih yang memiliki pemahaman mendalam tentang pemilu cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik. Dengan menyediakan ruang simulasi dan diskusi, RPP memungkinkan pemilih pemula untuk belajar secara langsung dan mendalam mengenai pemilu. Dalam menjalankan berbagai upaya edukasi ini, KIP bekerja sama dengan LSM dan pemerintah penyelenggaraan talkshow dan diskusi publik. Selain itu, media sosial menjadi alat utama dalam menjangkau pemilih pemula yang mayoritas aktif di dunia digital. Platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan interaktif. Namun, observasi menunjukkan bahwa strategi media sosial KIP masih kurang inovatif dan lebih banyak berfokus pada kegiatan internal dibandingkan dengan edukasi pemilih. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kreatif seperti konten interaktif, infografis, dan video edukatif untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan.

Dalam mengedukasi pemilih pemula, KIP Kota Banda Aceh merujuk pada *Modul Panduan Pendidikan Pemilih* (2015) yang menekankan empat aspek utama, yaitu demokrasi, kelembagaan negara, pemilu, dan partisipasi politik (KPU, 2016; KPU RI, 2010). Berbeda dengan strategi edukasi bagi masyarakat umum yang lebih kompleks dan membahas isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas, strategi untuk pemilih pemula lebih berfokus pada pembentukan pemahaman dasar mengenai hak suara, tahapan pemilu, dan simulasi pemilihan. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran awal tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi, sehingga mereka tidak hanya memahami hak

suara secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang lebih mendalam umum (Rahmawati, 2018; Syahruni, 2014). Melalui metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan pemanfaatan media audiovisual, pemilih pemula diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses demokrasi.



Gambar 2. Kerangka Hasil Penelitian Olahan Peneliti (2023)

Meskipun strategi yang diterapkan oleh KIP telah mencakup berbagai aspek komunikasi, akun media sosial resmi KIP memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital masih memiliki beberapa kekurangan. KIP secara aktif membagikan informasi terkait kegiatan mereka, namun pendekatan komunikasi yang digunakan masih kurang inovatif dan kurang menarik bagi pemilih pemula. Konten KIP sebagian besar menampilkan kegiatan internal KIP, sehingga kurang mampu menarik perhatian dan membangun keterlibatan pemilih pemula secara online. Penelitian (Alimadi & Nurmayuli, 2023) cukup memperkuat hasil penelitian ini. Penelitian tersebut menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan informasi guna meningkatkan partisipasi publik dan penyelenggaraan pemilu 2024.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan pemilih pemula, mereka sangat mengapresiasi inisiatif KIP dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hak suara dan tahapan pemilu. Namun, mereka juga menekankan pentingnya penyampaian informasi dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kebiasaan mereka dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih kreatif, seperti pembuatan konten visual yang menarik, video

pendek, infografis interaktif, serta penggunaan tren media sosial yang lebih sesuai dengan preferensi generasi muda (Suryanef & Rafni, 2020).

Menurut Dr. Effendi Hasan, M.A., seorang akademisi di bidang politik, penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi pemilih pemula merupakan langkah strategis yang efektif. Media sosial dianggap sebagai platform yang dapat langsung menyentuh minat dan preferensi pemilih muda. Generasi millenial dan Gen Z yang lebih aktif dalam dunia digital menjadikan media sosial sebagai sarana pendidikan politik yang lebih mudah diakses dan lebih menarik dibandingkan metode konvensional. Dr. Effendi Hasan juga menekankan bahwa strategi yang diterapkan oleh KIP Kota Banda Aceh perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika sosial serta perkembangan teknologi. Keterlibatan tokoh muda, influencer, serta pendekatan komunikasi yang lebih personal dan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas strategi sosialisasi pemilu di kalangan pemilih pemula.

Hasil penelitian ini dapat ditinjau dengan model pembelajaran organisasi yang dikemukakan oleh Argyris dan Schön (1978). Model ini menjelaskan bagaimana organisasi dapat belajar, beradaptasi, dan berkembang dengan mengolah informasi serta pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan inovasi (Argyris, 1996; Kolb, 1984). Dalam perspektif teori pembelajaran organisasi, terdapat dua model pembelajaran yang dilakukan organisasi, yaitu Single-Loop Learning dimana organisasi memecahkan masalah dengan menyesuaikan kebijakan atau tindakan tanpa mengubah nilai dasar organisasi, dan Double-Loop Learning, dimana organisasi memeriksa dan mengubah asumsi serta nilai dasar yang mendasari kebijakan organisasi. Strategi edukasi yang dilakukan KIP mencerminkan pendekatan single-loop learning dan double-loop learning. Dalam single-loop learning, KIP hanya menyempurnakan metode edukasi yang sudah ada tanpa melakukan perubahan mendasar terhadap strategi komunikasi. Sementara dalam double-loop learning, seharusnya ada upaya lebih lanjut dalam mengevaluasi efektivitas pesan, menyesuaikan strategi komunikasi, serta memperbaiki model edukasi agar lebih sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Sayangnya, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek double-loop learning belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh KIP, sehingga strategi edukasi masih kurang inovatif dan kurang adaptif terhadap perkembangan pola konsumsi informasi pemilih pemula.

Analisis berfokus pada rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana strategi komunikasi KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan edukasi pada pemilih pemula. Analisis dilakukan menggunakan teori penerimaan informasi yang dikemukakan oleh (enactment), seleksi (selection), dan retensi (retension) (West, 2009).

Aspek pertama adalah penerimaan Informasi atau enactment. Penerimaan informasi mengacu pada proses dimana informasi diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. Anggota organisasi memperhatikan informasi mereka terima untuk mengidentifikasi yang permasalahan. Proses penerimaan informasi melibatkan bagaimana anggota menerima, memproses, merespons berbagai jenis informasi (Morissan, 2013). KIP Kota Banda Aceh mengelola informasi yang diterima dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, media, serta badan ad hoc seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). PPK dan PPS dapat mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat tentang pemilu dengan terjun ke masyarakat.

Informasi tersebut kemudian diterima dan diolah untuk menentukan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Berdasarkan wawancara dengan informan Muhammad Zar, KIP telah memberikan informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang terbukti dari tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam pemilu 2019. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat benar dan tidak terdistorsi oleh hoaks. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi berkelanjutan untuk memastikan masyarakat, terutama pemilih pemula, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memilah dan memahami informasi yang benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KIP telah menerapkan strategi edukasi pemilih pemula berdasarkan konsep informasi organisasi Karl Weick. KIP melakukan tahapan berupa penerimaan informasi, seleksi informasi, dan retensi berupa penentuan strategi edukasi. Namun sayangnya, strategi edukasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh masih belum optimal dalam menjangkau dan meningkatkan pemahaman pemilih pemula. Salah satu kendala utama adalah bahwa KIP sebagian besar masih

menggunakan strategi yang diterapkan pada Pemilu 2019 tanpa adanya inovasi yang signifikan dalam pendekatan edukasi. Padahal, karakteristik pemilih pemula terus berkembang, terutama dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dan media digital.

Dalam perspektif teori pembelajaran organisasi, strategi edukasi yang dilakukan KIP hanya menerapkan pendekatan single-loop learning. KIP hanya menyempurnakan metode edukasi yang sudah ada tanpa melakukan perubahan mendasar terhadap strategi komunikasi. Belum ada upaya mengevaluasi untuk efektivitas menyesuaikan strategi komunikasi, serta memperbaiki model edukasi agar lebih sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Sebagai rekomendasi, KIP perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas edukasi pemilih pemula. KIP harus mengoptimalkan konten digital agar lebih menarik dan interaktif bagi pemilih pemula, misalnya dengan menggunakan format video pendek, infografis yang lebih menarik, serta pendekatan storytelling yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih muda. Kemudian, perlu adanya keterlibatan komunitas serta tokoh muda Aceh yang memiliki pengaruh di kalangan anak muda agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat deskriptif tanpa adanya data kuantitatif yang kuat, seperti survei atau statistik yang dapat menunjukkan perubahan tingkat pemahaman dan partisipasi pemilih pemula sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mengukur secara lebih akurat efektivitas strategi edukasi yang diterapkan oleh KIP.

REFERENSI

- Adawiyah, R. (2019). Strategi Komunikasi Pemilihan Umum (KPU) Povinsi Banten dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang pada Pemilihan Calon Legislatif (PILEG). *Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Affandi, F. N. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muhammadiyah Malang*.
- Alfaruqy, M. Z. (2019). Perilaku Politik Generasi Milenial: Sebuah Studi Perilaku Memilih (Voting Behavior). *Jurnal Psikologi Jambi*, *Vol. 4 No. 1* (2019).
- Alimadi, & Nurmayuli. (2023). Optimalisasi Peran KIP dengan Media Sosial alam Meningkatkan Partisipasi Publik Ddan Penyelenggara Dalam Pemilu 2024. *At-Tabayyun: Journal Islamic*

- Studies, Volume 5(Nomor 1, Januari-Juni).
- Argyris, C., & S. D. A. (1996). *Organizational Learning Ii: Theory, Method and Practice*. Addison-Wesley.
- Bin Hasyim, S., Shiddiq Fauzan, H., & Kunci, K. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum (Vol. 1, Issue 1). www.lanmas.fisip.uniga.ac.id
- Chen, M., & Madni, G. R. (2024). Unveiling The Role of Political Education for Political Participation in China. *Heliyon*, *10*(10), E31258. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31258
- Dahlgren, P. (2009). *Media and Political Engagement:* Citizens, Communication nd Democracy. Cambridge: Cup.
- Effendy. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*. Remaja Rosdakarya.
- Efriza. (2012). Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabate.
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, *I*(1), 51–59. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68
- Fitria, C. R. (2023). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2024. Universitas Lampung.
- Hardiyanti, S. Et All. (2021). Model Sosialisasi Pemilihan Presiden 2019 di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Heriyanto (2023). Pelatihan Pemilih Pemula dalam Rangka Memberikan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu untuk Peningkatan Partisipasi Mahasiswa pada Gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Pontianak. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 5(2), 297.
- Kaelola, A. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Penerbit Cakrawala.
- Kip. (2023). *Data Pemilih Kota Banda Aceh*. www.kipbandaaceh.go.id.
- Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall.
- Kpu. (2016). Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2016. Komisi Pemilihan Umum.
- KPU RI. (2010). Pemilu Untuk Pemula.
- Lai, W. (2024). The Effect of Education on Voter

- Turnout In China's Rural Elections. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 221, 230–247. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.03.021
- Lestari, D. S. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. Universitas Muhammadiyah.
- Littlejohn, S. W., & F. K. A. (2010). *Theories of Human Communication (9th Ed)*. Thomson Wadsworth.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Morissan.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, A. (2021). Efektivitas Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 45–60.
- Puspitasari, I. (2024). Persepsi dan Orientasi Politik Generasi Muda terhadap Pemilihan Partai Politik. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(3), 76–85.
- Rahmawati, D. (2018). Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 112-126.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Mengahadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1), 31–37.
- Santoso, B., & L. P. (2020). (2020). Peran Media Sosial dalam Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Media an Demokrasi*, 7(3), 77-89.
- Stachofsky, J., Schaupp, L. C., & Crossler, R. E. (2023). Measuring The Effect of Political Alignment, Platforms, and Fake News Consumption on Voter Concern for Election Processes. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101810. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101810
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suryanef, & Rafni, A. (2020). First-Time Voter Education Through The Democracy Volunteer Movement. *Moral and Civic Education*, *November* 2020.
- Syahruni, H. R. (2014). KPU dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014. Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis:Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.

- West, R. Dan T. L. H. (2009). Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application). Salemba Humanika.
- Wulandari, R., & Kurniawan, E. S. (2024). Edukasi Bagi Pemilih Pemula ebagai Upaya Partisipasi Masyarakat dalam Gelaran Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Gerakan Mengabdi untuk Negeri*, 2(2), 43– 51. https://doi.org/10.37729/gemari.v2i2.4878
- Zulfan, Z., Amin, M., & Saleh, A. (2022). Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Marginal pada Pemilu 2019. *Perspektif*, 11(2), 428–442.

https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5800

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Uswatun Nisa, Muhammad Hasan, Rahmawati, dan Zuhra Meiliza. This is anopen-access article dis-tributed underthe terms of the CreativeCommonsAttribution

License(CCBY). Theuse, distributionorreproductioninother forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publica-tion in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permit-ted which does not comply with these terms.